

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Peran *Stakeholders* dalam upaya penurunan kasus *Tuberculosis* (TB) di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Peran *stakeholders* dalam Upaya penurunan kasus *Tuberculosis* (TB) di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, melibatkan berbagai *stakeholders* dengan peran yang berbeda.

*Policy creator*, seperti Dinas Kesehatan Kota Semarang, Walikota, dan Bappeda, bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan. Koordinator, termasuk DKK, Kecamatan, Puskesmas, PKK, dan FKS, berperan dalam koordinasi, namun masih terkendala kurangnya komunikasi yang hanya terbatas pada forum formal. Fasilitator, seperti DKK, Kecamatan, Puskesmas, dan PKK, menghadapi kendala keterbatasan anggaran dalam penyediaan fasilitas. Implementor, yang terdiri dari DKK, Kecamatan, Puskesmas, kader TB, Satgas TB, dan masyarakat, belum optimal, terutama karena jumlah kader yang minim dan Satgas TB yang baru dibentuk pada 2025. Akselerator, yang dipegang oleh LSM seperti MSI dan Global Fund, telah berperan maksimal dalam percepatan penurunan kasus TB.

Peran *stakeholders* sebagai koordinator, fasilitator, dan implementor belum maksimal dalam menjalankan perannya dikarenakan masih mengalami

berbagai kendala. Meskipun demikian, dalam upaya penurunan kasus *Tuberculosis* (TB) di Kecamatan Pedurungan peran penting dipegang oleh Implementor dan Akselerator, dimana Impelementor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader TB, dan Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program baik secara langsung ataupun tidak langsung. Peran akselerator juga sangat penting dalam memastikan percepatan dan dukungan keberlanjutan program TB di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Faktor berkontribusi yang menjadi pendorong dalam upaya penurunan kasus *Tuberculosis* (TB) di Kecamatan Pedurungan adalah Aksesibilitas dan Penentu tindakan, Dinkes Kota Semarang sudah memberikan kemudahan akses untuk masyarakat Kota Semarang dan *stakeholders* lainnya dengan memberikan informasi terkait dengan jumlah kasus dan sebagainya pada *dashboard* Kesehatan Dinkes Kota Semarang, target dan rencana kerja yang dimiliki para *stakeholders* dalam upaya penurunan kasus TB di Kecamatan Pedurungan juga sudah jelas dengan mengacu target yang sudah ditentukan oleh Dinkes dari tingkat provinsi dan nasional. Serta Faktor berkontribusi yang menjadi penghambat dalam upaya penurunan kasus *Tuberculosis* (TB) adalah partisipasi *stakeholders* dan persfektif *stakeholders*. Dari segi partisipasi dan persfektif aktor masyarakat masih kurang jarang yang terlibat dalam mengikuti program dan stigma yang ada di masyarakat terkait dengan bahayanya TB yang membuat penyintas enggan membuka dirinya sehingga kasus tidak ditemukan.

## 4.2. Saran

Sebagai hasil dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan Peran *Stakeholders* Dalam Upaya Penurunan Kasus *Tuberculosis* (TB) di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang :

1. Peran koordinator agar dijalankan dengan optimal harus saling membangun komunikasi antar *stakeholders*, rapat rutin juga harus dijalankan oleh *stakeholders* setempat seperti Kecamatan, Kelurahan, dan Puskesmas setidaknya sebulan sekali, diluar rapat lintas sektoral. Sehingga, nantinya akan membentuk kolaborasi yang maskmimal dalam upaya penurunan kasus TB di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Peran fasilitator agar dijalankan dengan optimal harus saling memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, fasilitator yang berperan penting seperti Dinkes Kota Semarang dan Puskesmas harus selalu mengelola faslitasnya dengan baik dan melakukan kerjasama yang lebih dengan *stakeholders* swasta dalam membentuk pendanaan, agar pengadaan alat atau obat bisa dilakukan mandiri.
3. Peran implementor agar dijalankan dengan optimal harus saling merangkul antara satu dengan yang lain, penambahan peran kader TB di wilayah Pedurungan juga harus ditambah agar tidak memiliki peran ganda, peningkatan kapasitas pada Satgtas TB di Kecamatan Pedurungan untuk segera menjalankan tugasnya, karena Satgas TB

adalah bentuk percepatan penanggulangan TB di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan dan Kelurahan juga harus intensif dalam memberikan edukasi baik secara langsung dan tidak langsung walaupun tidak terjun langsung secara teknis, serta *stakeholders* lainnya harus bisa membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pengupayaan TB di wilayah Pedurungan untuk mewujudkan Kota Semarang bebas TB 2028.

4. Untuk mengoptimalkan peran akselerator, *stakeholders* seperti Dinkes, Puskesmas, Kader harus menjalin kerja sama dengan lembaga yang memang fokus pada penurunan kasus TB, seperti MSI dan Global Fund dimana kerja sama dibentuk secara berkelanjutan, agar menambah investasi modal / dana dalam membantu percepatan penurunan kasus TB di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
5. Melakukan harmonisasi aturan yang digunakan untuk penyesuaian peran multisektoral guna menciptakan keselarasan dan kesesuaian penanggulangan di bidang kesehatan, salah satunya *Tuberculosis* (TB).
6. Kecamatan Pedurungan menyelenggarakan rapat rutin, atau memanfaatkan sosial media seperti saluran berkomunikasi *whatsapp group* untuk melakukan komunikasi ke bawah kepada Puskesmas, Kelurahan, PKK, FKK, Satgas TB, Kader TB, dan

Masyarakat untuk membangun pemahaman yang selaras dan pembagian informasi serta *feedback*.

7. Dinas Kesehatan Kota Semarang harus intensif dalam memberikan sosialisasi keterbukaan informasi terhadap *dashboard* Kesehatan DKK Semarang agar tidak dinilai tertutup dalam memberikan informasi dan membangun minat masyarakat dalam menambah pengetahuannya ketika melihat *dashboard* kesehatan tersebut.
8. Kecamatan, Puskesmas, dan Kelurahan harus kreatif seperti memanfaatkan social media dan *door-to-door* dalam mengajak masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti program-program seperti sosialisasi, skrining, dan sebagainya, karena partisipasi masyarakat dalam upaya penurunan kasus TB di Kecamatan Pedurungan masih sangat minim.
9. Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan Satgas, Kader, PKK dan FKK harus memberikan sosialisasi yang intensif pada masyarakat baik dalam kegiatan perkumpulan warga, posyandu, dan kegiatan lainnya kepada masyarakat untuk menghapus stigma buruk terhadap penyakit *Tuberculosis* (TB) di kalangan masyarakat.